

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi yang menjadi pusat perhatian pemerintah di semua negara, kompleksnya permasalahan kemiskinan membuatnya terus menjadi masalah besar dan penting di belahan dunia seperti negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang individu atau kelompok dalam suatu masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang diakibatkan oleh tingkat pendapatan yang rendah selain itu. Kemiskinan juga dapat diinterpretasikan sebagai situasi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan ekonomi dan sosialnya, yang tercermin dalam rendahnya produktivitas, kemauan untuk maju yang lemah, dan terbatasnya modal, pendidikan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi (Hardana, A. 2023). Kemiskinan, dalam beragam definisinya, menggambarkan kondisi ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini mencakup aspek-aspek seperti aset, sumber keuangan, organisasi sosial-politik, jaringan sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemiskinan bisa dilihat sebagai suatu kondisi yang kompleks, bukan sekadar hasil akhir tetapi juga sebagai proses interaksi individu dengan lingkungannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemiskinan, menurut Papilaya, J. (2020), dapat diidentifikasi melalui sejumlah indikator yang mencerminkan berbagai aspek kehidupan. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Kenaikan pendapatan per kapita dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta memiliki dampak signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan (Purnomo, Istiqomah, & Suharno, 2020). Selain itu, ketika masyarakat atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi pangan, sandang, dan papan. Kurangnya akses terhadap layanan penting seperti air bersih, kondisi sanitasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi adalah tanda lainnya. Kemiskinan juga bermanifestasi sebagai ketidakmampuan merencanakan masa depan, yang dapat disebabkan oleh kurangnya komitmen terhadap keluarga dan pendidikan. Kerentanan terhadap berbagai risiko, baik risiko pribadi maupun sosial, serta kualitas sumber daya manusia yang rendah dan sumber daya alam yang terbatas merupakan ciri-ciri kemiskinan lainnya.

Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu tantangan sosial-ekonomi terbesar di Indonesia. Provinsi ini dikenal memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Upaya penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) memerlukan pendekatan yang komperhensif mengingat karaktersistik daerah ini yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan ekonomi. Beberapa penanggulangan kemiskinan di NTT yang dapat dilakukan adalah melalui

pengembangan infrastruktur dasar seperti akses jalan dan transportasi dimana pengembangan jalan di daerah pedesaan untuk meningkatkan aksesibilitas ke pasar dan layanan. Selain itu, dengan adanya peningkatan pendidikan dimana meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah dengan membangun fasilitas sekolah dan melatih tenaga pendidik. Dan untuk di Kabupaten Kupang sendiri penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan strategis yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu langkah utama adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi potensi utama daerah. Program pelatihan keterampilan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. selain itu, pemerintah Kabupaten Kupang mengimplementasikan program bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin. Pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan akses air bersih, juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan menjadi fokus utama guna memutus rantai kemiskinan dan mendorong kemandirian masyarakat di Kabupaten Kupang.

Kemiskinan di Kabupaten Kupang masih menjadi tantangan besar yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Kabupaten ini

memiliki kondisi geografis yang beragam dengan sebagian besar wilayah terdiri dari perbukitan dan dataran kering, yang membatasi produktivitas sektor pertanian dan akses terhadap air bersih. Banyak penduduknya bergantung pada sektor pertanian subsisten yang rentan terhadap perubahan iklim dan minim dukungan teknologi. Keterbatasan infrastruktur, seperti akses jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan, juga memperburuk kondisi sosial masyarakat. Selain itu, rendahnya akses terhadap peluang kerja yang layak menyebabkan banyak penduduk terjebak dalam siklus kemiskinan. Dengan demikian, permasalahan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif, seperti peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pengembangan infrastruktur dasar.

Pemerintah memiliki upaya melalui pengeluaran Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kupang mencakup berbagai program dan lokasi anggaran yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. salah satu pengeluaran utama adalah dalam bidang pendidikan, seperti penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, peningkatan fasilitas sekolah, dan pelatihan keremampilan kerja bagi pemuda. Di bidang kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program jaminan kesehatan gratis, pembangunan pusat pelayanan kesehatan, serta penyediaan layanan imunisasi dan gizi untuk ibu dan anak. Selain itu, di sektor infrastruktur, pemerintah berinvestasi dalam pembangunan jalan desa, akses air bersih, dan fasilitas sanitasi untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat miskin. Pengeluaran lainnya mencakup program bantuan sosial, seperti bantuan pangan, dan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan Usaha Kecil serta pemberian modal usaha. Langkah- langkah ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan peluang bagi masyarakat miskin agar lebih mandiri secara ekonomi.

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belanja yang bersentuhan langsung dengan program penanggulangan kemiskinan adalah belanja Bantuan Sosial. Belanja bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Pihak swasta juga memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan. Selain belanja bantuan sosial yaitu melalui investasi yang dilakukan oleh pihak swasta melalui penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Selain belanja bantuan sosial membantu dalam mengatasi kemiskinan, belanja modal merupakan belanja yang mengeluarkan anggaran senantiasa

untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang nantinya memberikan manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal tersebut meliputi, gedung dan bangunan, peralatan serta aset tidak berwujud belanja modal dapat dikatakan juga sebagai belanja tidak langsung (Saraswati, 2018). Dapat dilihat pada tabel berikut terkait dengan jumlah dan angka kemiskinan yang disertai dengan data belanja bantuan sosial dan juga data belanja modal di Kabupaten Kupang. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan output perkapita dalam jangka panjang.

Dalam praktek, pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa besar PDB (riil) perkapita tumbuh dari waktu ke waktu (Acemoglu, Laibson, & List, 2019). Teori-teori pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menjelaskan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi output (PDB/PDRB) suatu negara/daerah. Dalam pandangan Keynesian, output dibentuk dari pembelajaan para pelaku ekonomi. Belanja pemerintah dianggap sebagai faktor eksogen yang dapat menjadi instrumen kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembelajaan pemerintah dapat memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pembelajaan pemerintah cenderung akan meningkatkan kesempatan kerja, profitabilitas dan investasi melalui efek multiplier yang ditimbulkan kepada permintaan agregat. Pengeluaran atau pembelajaan pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat, dan selanjutnya akan meningkatkan output melalui proses multiplier. Pada tahap akhir, peningkatan output agregat diharapkan akan mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

**Tabel 1. 1 Data Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kabupaten Kupang
Tahun 2010-2024**

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2010	192.170
2	2011	189.512
3	2012	206.751
4	2013	333.618
5	2014	217.089
6	2015	281.818
7	2016	297.440
8	2017	314.437
9	2018	343.578
10	2019	350.504
11	2020	347.844
12	2021	339.542
13	2022	334.004
14	2023	340.020
15	2024	352.516

Sumber data sekunder: BPS Kabupaten Kupang 2025

Berdasarkan pada Tabel 1.1 kemiskinan di Kabupaten Kupang selama lima belas tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dapat dilihat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan total 352.516 ribu jiwa dan tingkat kemiskinan terendah di tahun 2011 sebesar 189.512 ribu jiwa. Ketika tingkat kemiskinan naik maka belanja modal berfungsi meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara itu, belanja bantuan sosial ditujukan untuk memberikan dukungan langsung kepada masyarakat miskin.

**Tabel 1. 2 Data Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Kupang
Tahun 2010-2024**

No	Tahun	Belanja Bantuan Sosial (Rupiah)
1	2010	25.987.987.732
2	2011	20.230.057.400
3	2012	4.647.810.900
4	2013	11.484.739.800
5	2014	9.498.884.400
6	2015	2.192.000.000
7	2016	200.000.000
8	2017	340.000.000
9	2018	2.046.700.072
10	2019	2.537.500.000
11	2020	76.251.091
12	2021	301.200.000
13	2022	336.082.000
14	2023	84.000.000
15	2024	-

Sumber data sekunder: BPS Kabupaten Kupang 2025

Berdasarkan pada Tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa belanja bantuan sosial mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Belanja bantuan sosial dari Kabupaten Kupang mengalami peningkatan di tahun 2010 sebesar Rp 25.987.987.732 kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu hanya sebesar Rp 76.251.091. Ketika belanja bantuan sosial meningkat, kelompok masyarakat miskin rentan memperoleh dukungan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sebaliknya, ketika belanja bantuan sosial menurun, banyak keluarga miskin yang mungkin kehilangan akses terhadap bantuan tersebut. Hal ini berpotensi membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kerentanan terhadap berbagai risiko ekonomi. Penurunan belanja bantuan sosial juga dapat menyebabkan efek domino, seperti menurunnya daya beli masyarakat, peningkatan ketidakstabilan sosial, dan kemunduran kesejahteraan. Dalam jangka

panjang, hal ini bisa meningkatkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kupang, karena tanpa dukungan, mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, konsistensi dan ketepatan belanja bantuan sosial sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan secara keberlanjutan

Tabel 1. 3 Data Belanja Modal Kabupaten Kupang Tahun 2020-2024

No	Tahun	Belanja Modal (Rupiah)
1	2010	144.936.701.605
2	2011	110.856.245.130
3	2012	123.907.658.986
4	2013	120.201.877.363
5	2014	123.375.912.034
6	2015	188.586.870.000
7	2016	409.656.706.000
8	2017	213.682.915.000
9	2018	218.108.065.550
10	2019	160.217.090.740
11	2020	120.630.115.450
12	2021	153.328.333.590
13	2022	156.137.333.590
14	2023	158.145.354.000
15	2024	-

Sumber data sekunder: BPS Kabupaten Kuapang 2025

Berdasarkan pada Tabel 1.3 di atas, terlihat bahwa belanja modal Kabupaten Kupang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Belanja modal di Kabupaten Kupang pada tahun 2011 mengalami penurunan tetapi mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar Rp.409.656.706.000. Ketika belanja modal meningkat, lapangan kerja cenderung terbuka lebih banyak, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, jika belanja modal menurun,

investasi dalam infrastruktur dan pengembangan daerah berkuang, yang dapat menghambat peningkatan ekonomi masyarakat dan memperburuk kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Dengan demikian, konsistensi dan peningkatan belanja modal oleh pemerintah daerah menjadi penting untuk mendorong pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kupang.

Tabel 1. 4 Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan Kabupaten Kupang tahun 2010-2024

NO	TAHUN	PDRB (Persen)
1	2010	4,22
2	2011	4,80
3	2012	5,04
4	2013	5,07
5	2014	5,10
6	2015	5,10
7	2016	5,05
8	2017	4,81
9	2018	5,10
10	2019	5,11
11	2020	-0,77
12	2021	2,75
13	2022	2,74
14	2023	3,55
15	2024	2,81

Sumber data sekunder: BPS Kabupaten Kupang 2025

Pertumbuhan PDRB dari tahun 2010-2024 sangat stabil hingga ditahun 2020 mengalami kontraksi hingga -0,77 persen dan kembali meningkat ditahun 2021. Meskipun pertumbuhan PDRB ditahun 2021 meningkat menjadi 2,75 persen, tetapi nilai tersebut termasuk dalam kriteria tidak stabil atau rendah. Selama lima tahun terakhir, nominal nilai tambah dari aktifitas ekonomi Kabupaten Kupang cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun, dari sisi nilai rill, Kabupaten Kupang mengalami kontraksi perekonomian pada tahun 2020 yang ditandai

dengan menurunnya nilai tambah riil tahun tersebut, sebesar (-0,77) persen. Kontraksi tersebut merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan kegiatan perekonomian di tahun tersebut. Pada tahun 2021 PDRB nominal maupun riil Kabupaten Kupang mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2020, yakni sebesar 2,75 persen. Hal ini mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian di Kabupaten Kupang setelah pandemi covid-19. Menurut BPS Kabupaten Kupang, tahun 2020 hingga 2024 diketahui bahwa meskipun pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Kupang meningkat setiap tahun, namun terjadi perlambatan laju pertumbuhan perkapita pada tahun 2020 dan 2022 dimana laju pertumbuhan PDRB perkapita hanya tumbuh sebesar 2,74 persen dari tahun 2020. Nilai tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita periode 2023.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan seperti penelitian oleh Agustien Sendouw, Vekie A.Rumate, Debby Ch. Rotinsulu pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang negative dan signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan sedangkan belanja sosial dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado. Sedangkan seperti Penelitian oleh Gusti Pratiwi, Safuridar Safuridar, Martahadi Martahadi pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat

Kemiskinan di Kabupaten Langkat” hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan Penelitian dengan Judul ‘Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Sosial Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Di Kota Medan” oleh Muhammad Musthofa, Tri Indah Fadhilah, Khairina Tambunan pada Tahun 2024 dengan hasil penelitian Hasil Penelitian menunjukan bahwa, pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan adalah H_0 diterima dan H_0 ditolak, bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh signifikan dan positif. Meskipun telah banyak penelitian dengan judul yang hampir sama, tetapi kurangnya penelitian tentang dampak belanja bantuan social belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di daerah-daerah tertentu. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Belanja Bantuan Sosial berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kupang?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kupang?

3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kupang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kupang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai bahan untuk menambah wawasan atau pengetahuan serta sebagai bahan perbandingan dari penelitian terdahulu agar dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan referensi mengenai pengaruh belanja bantuan sosial belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Kupang
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat dan memutuskan suatu kebijakan terkait masalah kemiskinan.